

Proses Kasus Bansos KONI Melorot Polda Janji Periksa Anggota DPR-RI

PONTIANAK. Penanganan kasus hukum dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov Kalbar Tahun 2006-2009 senilai Rp 22,14 miliar oleh Polda Kalbar belum menunjukkan perkembangan berarti. Hingga sekarang, tak seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Belum ada tersangka," ujar AKBP Drs Suhadi SW MSi, Ke-

pala Bidang Humas Polda Kalbar kepada Equator, Selasa (1/2).

Menurut Suhadi, saat ini pihaknya masih fokus memeriksa saksi. "Dari keterangan saksi yang didapat, baru kita akan menentukan siapa yang menjadi tersangka," kata perwira dengan pangkat dua melati di pundak itu.

Soal pemeriksaan saksi, me-

yang bukan barang baru. Sejak Januari tahun ini hingga sekarang, setidaknya sudah 11 orang saksi yang diperiksa pihak kepolisian. Sayangnya, belum ada yang dijerat sebagai tersangka.

Kepolisian beralasan, pihaknya masih perlu mengumpulkan keterangan sebanyak mungkin.

■ Halaman 7

Proses Kasus

Keterangan yang dimaksud juga dari anggota DPR-RI. "Tapi untuk memeriksa mereka (anggota DPR-RI), ada prosedurnya," kata Suhadi.

Prosedur itu antara lain, penyidik Polda Kalbar harus melakukan gelar perkara di Bareskrim Mabes Polri bersama tim dari Kejaksaan Agung dan Kementerian Dalam Negeri. Dari situ, Bareskrim atas nama Kapolri menyurati presiden untuk meminta izin melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR-RI yang dimaksud.

"Setelah izin Presiden keluar, baru kita akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR-RI itu," ulas Suhadi seraya menolak menyebutkan siapa saja anggota DPR-RI yang akan diperiksa itu.

Sekadar mengingatkan, mencautnya kasus Bansos ini bermula dari hasil audit regular yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemprov tahun anggaran 2009, termasuk dana Bansos tahun 2006 hingga tahun 2009.

Terhadap laporan keuangan tersebut, BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias disclaimer opinion (DO). Penyebab DO, BPK tidak meyakini

beberapa item penggunaan anggaran. Jumlah terbesar diketahui berada pada sektor penggunaan dana Bansos untuk KONI, serta beberapa item anggaran lainnya.

Untuk meneliti penggunaan dana tersebut, BPK Perwakilan Kalbar kemudian membentuk tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Tim yang berjumlah lima orang itu melakukan penelitian dengan fokus utama penelitian dana Bansos dan bantuan untuk KONI.

Dari hasil penelitian PDTT, BPK Perwakilan Kalbar mengindikasikan adanya kerugian negara. Indikasi ini selanjutnya diproses oleh BPK Perwakilan Kalbar dan BPK Pusat yang hasilnya menemukannya empat item penggunaan Bansos bermasalah.

Empat item itu adalah temuan dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, yang digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp 10,07 miliar. Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Prapon sebesar Rp 1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan.

..... dari halaman 1

Selanjutnya ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp 8,59 miliar. Yang terakhir ada ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah sebesar Rp 2,114 miliar.

Penanganan kasus Bansos KONI Kalbar ini sempat terkutung-katung hampir satu tahun. Polda Kalbar berdalih belum mengantongi hasil audit PDTT dari BPK, karena BPK Perwakilan Kalbar melalui BPK Pusat menyerahkan hasil audit tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Atas dasar sudah ditangani polisi, KPK kemudian menunjuk pihak kepolisian untuk menangani kasus dugaan korupsi ini secara tuntas. KPK juga sudah menyerahkan hasil audit PDTT BPK ke Polda Kalbar, terhitung sejak 9 Desember 2010. Atas dasar itu, mulai awal Januari 2011, kasus ini ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Sebelum ditangani Polda Kalbar, kasus ini ditangani Poltabes Pontianak (sekarang Polresta), Jumat 20 November 2009. (bdu)